

# Politik Partisipasi dan Tahun Pemuda Internasional

Oleh J.C. Tukiman Taruna

TIDAK gampang merumuskan seberapa jauh partisipasi Pemuda Indonesia dalam Tapin (Tahun Pemuda Internasional) 1985 ini. Berita di koran pun rasanya sangat miskin, khususnya kalau kita ingin membaca kegiatan-kegiatan pemuda mendalami tema partisipasi, pembangunan dan perdamaian (3P).

Yang dapat kita baca antara lain sambutan bangsa Indonesia tanggal 10 Januari 1985 yang lalu, berikut kemudian kerja sama Menpora dan PWI dalam menyelenggarakan Lomba Penulisan Tapin 85. Di sana sini masih ada kegiatan ala kadarnya memang, namun rasanya tidak mendalami masalah/tema yang disodorkan PBB sebagai tema sentral.

Kompas, 5 Januari 1985 memuat seruan Paus Yoanes Paulus II, yang antara lain meminta: "Dunia memerlukan kaum muda yang sudah minum banyak sekali dari sumber-sumber kebenaran. Kalian harus mendengarkan bisikan kebenaran dan untuk ini kalian memerlukan hati yang murni; kalian harus memahaminya, dan untuk ini kalian memerlukan kerendahan hati yang mendalam; kalian harus tunduk kepada kebenaran itu, dan untuk itu kalian memerlukan kekuatan untuk melawan godaan-godaan kesombongan, mementingkan diri sendiri dan manipulasi. Kalian harus membentuk di dalam diri masing-masing rasa tanggung jawab yang mendalam."

Namun dengan "berita-berita" semacam itu belum terlukis secara jelas kiprah pemuda Indonesia selama ini. Malahan, saya cenderung mengatakan, sebagai pemuda suatu bangsa, Pemuda Indonesia tidak mengambil bagian/peran serta penuh kreativitas dalam Tapin 85.

## Partisipasi: suatu problem

Masalah utama terletak pada kesenjangan pengertian tentang partisipasi. Nilai partisipasi, menurut penegasan Yoanes Paulus II, — harus dicari di dalam diri rakyat yang terus-menerus berjuang demi hak-haknya. Kekerasan dan ketidakadilan di masa lampau sering disebabkan oleh perampasan hak rakyat yang ingin membentuk kehidupannya sendiri. Kekerasan dan ketidakadilan di masa mendatang tidak dapat dielakkan bila hak asasi untuk berpartisipasi dalam memilih bagi setiap warga masyarakat diingkari.

Nilai partisipasi ditemukan dalam memberi keleluasaan hak, tetapi juga ia mengandung kewajiban untuk melaksanakannya dengan sikap hormat terhadap martabat pribadi. Pengamalan partisipasi tercermin dalam kepercayaan timbal balik antara warga negara dan para pemimpinnya, dan serta merta partisipasi menjadi batu sendi dalam membangun dunia yang damai.

Kesenjangan terjadi bila partisipasi sekadar diberi skala sebagai legitimasi kekuasaan. Taruhlah sebagai contoh pemuda yang diharapkan berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial. Kekuatan massa pemuda, gairah serta daya pikir mereka akan semakin memperkaya nilai

partisipasi bila tidak melulu diarahkan untuk memperkuat dan melegitimasi kekuasaan. Adanya kesulitan menggerakkan peran serta pemuda maupun masyarakat lainnya, antara lain disebabkan oleh pengertian nilai partisipasi yang dilepaskan dari tanggung jawab. Bila partisipasi sekadar berarti melaksanakan perintah yang datang dari kekuasaan birokrasi, sudah tentu orang merasa dijauhkan dari rasa tanggung jawab. Malah tidak mustahil segala tanggung jawab justru "ditarik ke atas," semata-mata menjadi "milik" penguasa birokrasi.

Dalam situasi semacam itu, ada bahaya tumbuh anggapan bahwa semakin pemuda tunduk patuh dan diam, — pendeknya bersikap penurut, — semakin tinggi derajat partisipasinya. Serta merta partisipasi berarti satu arus, satu jalur dan semakin terjal yang disebut alternatif. Dalam arus semacam itu hubungan kepercayaan timbal balik (*in casu* pemuda dan penguasa birokrasi) tidak muncul, sebab pihak penguasa lebih cenderung memberi perintah, petunjuk dan malahan petunjuk pelaksanaan; dan pemuda tinggal melaksanakan semua itu.

Perlulah kita meluaskan cakrawala partisipasi, khususnya bila kita ingin secara kreatif menanggapi ajakan PBB dalam Tapin 1985. Perdamaian — yang dicita-citakan oleh siapa pun — tidak cukup kita pikirkan asal tidak terjadi bentuk kekerasan dalam hubungan antar bangsa; atau sebagai kondisi keseimbangan militer pada tingkat persenjataan nuklir atau konvensional.

Dr Soedjatmoko, dalam *Etika Pembebasan*, Jakarta 1984, hal. 219 juga telah menegaskan: "Sebuah perdamaian yang tidak mampu mengatasi dualisme struktural dunia, yang menghalangi usaha-usaha pembangunan di Dunia Ketiga, paling banter hanya menjadi perdamaian yang bersifat sementara. Perdamaian hanya bisa langgeng bila orde internasional yang mendukungnya mampu memimpin perubahan damai secara struktural dalam dirinya sendiri."

Partisipasi sebagaimana disempitkan sebagai "abdi birokrasi" tentu merupakan penghalang struktural, yang dalam skala internasional akan menciptakan kendala serius bagi terwujudnya perdamaian. Tiadanya rasa tanggung jawab dalam diri para pemuda, sebab mereka lebih senang sekadar melaksanakan saja, tentunya menunjuk juga tiadanya alternatif

Seperti ditulis oleh Soedjatmoko, suatu bangsa, termasuk yang paling kuat pun, harus belajar hidup pada suatu tingkat yang belum pernah terjadi selama ini, yakni tingkat yang mudah goyah sebagai kondisi permanen dari orde internasional.

## Regional

Di wilayah Asia khususnya terdapat kesadaran yang meningkat akan perlunya organisasi regional serta bentuk-bentuk kerja sama yang dapat menjembatani perbedaan ideologis demi kepentingan bersama.

Ketika saya diundang turut suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh seksi muda-mudi

dan mahasiswa FABC (*Federation of Asian Bishop's Conferences*) di Bombay, India (Oktober 84), muncul suatu kesadaran bersama para pemuda di wilayah Asia. Isi kesadaran itu terdapat antara lain: kita ini sama-sama bekas negara koloni, umur kemerdekaan negara kita pun rata-rata sama, dan masih relatif muda. Kita menghadapi tantangan yang hampir sama, yakni perjuangan untuk maju, sementara negara kita masing-masing diperkaya oleh hidup budaya dan agama yang beragam. Pemuda-pemudi di kawasan Asia bukan saja membutuhkan organisasi regional, melainkan perlu menjalin kerjasama regional, agar orientasi kita tidak melulu ke barat atau ke utara; sebab kita harus memiliki orientasi sendiri, yakni Asia.

Dalam pertemuan itu memang dipersoalkan panjang lebar masalah yang menyangkut kebijakan masing-masing negara dalam politik partisipasi. Semua sadar betapa pentingnya partisipasi, khususnya partisipasi pemuda demi pembangunan negaranya. Namun semua juga mengimbau agar politik partisipasi (pemuda) dirumuskan kembali dengan mengikutsertakan pemuda dalam perumusan itu. Oleh karena itu, menanggapi seruan PBB dalam Tapin 85 ini, sangat mendesak bagi Pemerintah Indonesia untuk mengajak kekuatan Pemuda membicarakan politik partisipasi. Pertanyaan pokok tentu ini untuk apa dan ke mana partisipasi itu? Siapa pemegang "kunci" politik partisipasi?

Politik bebas aktif yang dianut Pemerintah kita (RI) perlu memberi peluang bagi pemuda untuk berperan serta secara regional. Konsep ASEAN untuk menjadikan Asia Tenggara wilayah damai dan netral, berikut usaha agar Samudera Hindia terbebas dari nuklir, memerlukan kondisi-kondisi tertentu pada tingkat regional. Soedjatmoko mengajukan dua arus dasar pemikiran.

Yang pertama, dibutuhkan kemampuan yang jauh lebih besar dalam menghargai kebudayaan, agama dan ideologi politik lain; hal-hal itu membutuhkan tingkat-saling-pengertian yang lebih mendalam.

Kedua, kita semua harus belajar mengendalikan dan mengelola ketakutan-ketakutan kita secara lebih efektif dan konstruktif. Tegasnya, demi perdamaian, diperlukan tingkat keberanian tertentu, seperti usaha-usaha ASEAN dewasa ini berkenaan dengan masalah Kamboja.

Dari FABC seksi muda-mudi dan mahasiswa (OESC: *Office of Education and Student Chaplaincy*) edisi April 1985, saya memperoleh gambaran bahwa pembangunan regional Asia sangat ditentukan oleh politik pendidikan. Wilayah regional Asia dan Pasifik diperkirakan menampung 90 persen kemiskinan dunia, berikut ada 618 juta dari 857 juta penduduk Asia adalah buta huruf. Melihat angka-angka itu jelas bagi kita — khususnya bagi para pemuda — betapa mendesaknya politik pendidikan di masing-masing negara, termasuk Indonesia.

Organisasi Pemuda, tingkat nasional maupun regional, harus sesegera mungkin merumuskan peran sertanya dalam dunia pendidikan ini. Para pemuda perlu secara kontinyu dikerahkan untuk menangani buta huruf. Para pemuda harus menjadi pelopor pemberantasan buta huruf, dan karena itu program-programnya perlu diarahkan ke sana.

Kita semakin lama semakin yakin bahwa kebodohan akan menghambat segala macam pembangunan. Apa artinya tulisan "cintailah lingkunganmu!" kalau sebagian warga masyarakat masih buta huruf. Apa artinya slogan-slogan yang dipasang di mana-mana, sebab orang tidak berperhatian ke sana, mengingat kemampuan untuk membaca (dan mengertinya) tidak ada?

Diusulkan untuk wilayah Asia dan Pasifik empat perhatian utama untuk masalah ini:

Pertama, perlunya diciptakan baik secara nasional maupun regional kondisi dan peri hidup obyektif. Tuntutan hidup minimal (sandang, pangan dan papan, berikut pendidikan) mendesak untuk dipenuhi.

Kedua, pendidikan religius perlu digalakkan mengingat wilayah kita ini diberi karunia Tuhan dengan kekayaan religi.

Ketiga, peningkatan mutu dan jumlah guru; baik guru yang secara formal terlibat dalam proses belajar-mengajar di sekolah, maupun yang secara non formal menjadi penyuluh di dalam masyarakat. Tentang yang nonformal inilah para pemuda dapat berperan penuh tanggung jawab.

Keempat, pelayanan secara memadai bagi remaja. Dengan Tapin 1985 pelayanan remaja ini perlu dimulai. Kalau telah merasa dimulai, perlu bentuk-bentuk pelayanan yang memadai.

## Pemuda Indonesia

Aneka ragam organisasi pemuda di Indonesia sebagian besar "jatuh" pada masalah kaderisasi. Maksud kami ialah, hampir semua sibuk dengan masalah-masalah kaderisasi, dan itu berarti mengarah ke dalam. Masing-masing dari hari ke hari mempersiapkan kader entah untuk tujuan apa. Hal ini pulalah salah satu kesulitan, mengapa partisipasi kaum muda dalam program-program pembangunan senantiasa kandas.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
JL. MAYOR JENDERAL SUPOYO-CILILITAN  
JAKARTA TIMUR

SUMBER : *Kompas*

HARI/TGL : *Selasa 30-7-85*

HAL/KOL : *Sambungan dari hal. 10 hal. 7-9*

KODE : *28/11*

Karena sibuk ke dalam, orientasi masalah sosial tidak dilihatnya. Tantangan sebagaimana ditunjukkan oleh data di atas tidak mustahil akan ditanggapi: "Itu bukan soal Indonesia, apalagi soal pemuda Indonesia!" Tantangan dalam berperan serta pemberantasan buta huruf, mungkin sekali akan dijawab: "Kami telah me-

nyatakan bebas buta huruf, masyarakat kami sudah pinter-pinter!"

Orientasi masalah sosial sering dihambat pula oleh suatu kenyataan bahwa sibuk dalam kaderisasi disebabkan/didorong oleh jangkauan dalam politik praktis. Taruhlah KNPI! Dalam tubuh organisasi penuh fasilitas dan dukungan ini, sebagian besar waktunya habis untuk hal-hal yang menyangkut legitimasi kekuasaan, kaderisasi berjangkau politik praktis; sehingga orientasi masalah sosial (kalau pun ada departemen dan pengurusnya) sekadar aksidental.

Tak jauh berbeda dari KNPI, juga organisasi pemuda lainnya. Dalam tubuh organisasi itu gegap gempita di alam raya terjadi pada saat-saat akan terjadi pergantian pengurus. Masalah kerja dan pengabdian adalah nomor ke sekian, tetapi yang utama harus gegap gempita bila saat pemilihan pengurus terjadi.

Dalam situasi organisasi semacam itu, rasanya tidak berlebihan kalau diusulkan hal-hal berikut:

**Pertama**, pentingnya proses penyadaran sosial. Organisasi, apalagi pengurus organisasi itu, bukan yang terpenting. Karena itu bila dianggap baik, tidak perlu ada pergantian pengurus secara perio-

dik. Sebab, secara periodik pula akan terjadi segala macam permainan bagaimana memenangkan calonnya.

**Kedua**, Pemerintah RI perlu memberi tantangan konkret kepada pemuda dan organisasinya. Tantangan mencerdaskan bangsa perlu memperoleh prioritas pertama, dan secara awal dimulai dengan pemberantasan buta huruf berikut kemudian peningkatannya.

**Ketiga**, warga masyarakat, khususnya masyarakat remaja, sangat memerlukan pendampingan serius. Karena itu diperlukan pendampingan kakak-beradik. Mereka yang mahasiswa harus mendampingi adik-adiknya yang di bangku SMTA, berikut mereka yang di bangku SMTA perlu dipacu untuk mendampingi adik-adiknya yang di bangku SMTP. Begitu seterusnya. Bila iklim ini dapat tercipta, niscaya dengan sendiri paternalisme akan menghilang.

Begitulah, Tapin 1985 bukan suatu "puncak" melainkan awal sebuah perjalanan bagi suatu pembinaan dan pendampingan pemuda. Selamat ber-Tahun Pemuda Internasional 1985, Selamat mengubah orientasi! \*\*\*

\* J.C. Tukiman Taruna, guru dan pastor.